



Jangan Pulas Jumlah Kunjungan

Laporan Fira Nurfiani

PELAYANAN di sektor pariwisata tidak bisa disamakan atau dipukul rata, karena ada yang positif ada pula yang negatif. Tapi kadang hanya karena satu hal negatif, bisa merusak seluruh hal positif tentang citra pariwisata DIY. Nila setitik rusak susu sebelanga, jangan sampai merusak citra pariwisata dan budaya ramah tamah masyarakat DIY.

Secara umum, pariwisata di DIY masih bersifat atraktif yang diminati wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun DIY tidak bisa berleha-leha karena dunia pariwisata merupakan industri jasa yang labil. Meskipun DIY masih sering disebut sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik di Indonesia, tapi DIY tidak bisa lengah karena banyak daerah-daerah lain yang menjadi pesaing dan makin berbenah diri.

"Jangan puas dengan jumlah kunjungan wisatawan yang naik setiap tahunnya di DIY, bukan angka fantastis itu lagi yang harus dikejar DIY. Pariwisata DIY harus mengejar kualitas mulai dari pelayanan kepada tamu, citra orang akan destinasi kita maupun kesannya agar wisatawan betah dan berkunjung lagi ke DIY," ujar pakar dan pengamat pariwisata DIY, Phil Janianton Damanik.

Persoalan parkir, kebersihan dan sebagainya, menurutnya, merupakan masalah klasik dan sudah lama terjadi di dunia pariwisata DIY. Hal ini disebabkan pemerintah tidak mempunyai konsistensi mulai dari regulasi ataupun kesepakatan yang hanya digulirkan, tapi tidak dikawal dan diawasi pelaksanaannya di lapangan.

"Selama ini problematika tersebut selalu muncul dan sudah bukan hal yang baru lagi terjadi bagi dunia pariwisata DIY. Saya selalu mempertanyakan konsistensi pemerintah dengan regulasi-regulasi yang ada bagi sektor pariwisata," kata Anton, sapaan Janianton Damanik.

Anton menyarankan agar pemerintah

maupun pelaku pariwisata di DIY bisa konsisten melihat konsekuensi DIY sebagai destinasi pariwisata istimewa yang harus ditanggung bersama-sama. Pemerintah sebagai *leading sector*, seharusnya bisa konsisten dengan konsep destinasi pariwisata mulai dari aturan harga, kantong parkir, retribusi tempat wisata dan sebagainya.

"Jangan sampai muncul kebanggaan semu DIY istimewa, tapi sampah di mana-mana, parkir liar di mana-mana dan sebagainya. Selama ini pemerintah daerahlah yang membuat regulasi tapi jangan hanya berhenti di situ saja, harus ada pengawasan dan penegakan hukum atau *law enforcement*. Jadi tidak hanya membuat regulasi dan dilepas begitu saja, kan percuma," papar Anton.

Peneliti Senior Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM ini mengingatkan, selain pengawasan regulasi pemerintah, masyarakat juga harus memahami hal-hal yang dilakukannya sangat berisiko. Kedisiplinan menjaga budaya baik, kebersihan, sopan-santun dan peraturan itulah yang sampai saat ini sulit dilakukan masyarakat maupun pelaku pariwisata DIY. "Tidak hanya sanksi yang dikenakan, tetap harus ada reward atau insentif kepada masyarakat dan pelaku wisata yang mampu melaksanakan regulasi sebaik-baiknya," tambah Anton.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mendukung keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang mempunyai kemampuan menertibkan pungli parkir, harga makanan yang tidak wajar dan sebagainya. Penertiban dan tindakan tegas ini sangat diperlukan agar, pada saat kehadiran bandara internasional yang baru di Yogya nanti, semua yang meminta kepastian keamanan dan kenyamanan bisa dilayani. "Jangan sampai kita sudah bicara pariwisata skala internasional, tapi banyak pelayanan tidak standar," papar Sultan HB X.

Menurutnya, masyarakat maupun birokrat harus mempunyai kebulatan tekad

tidak Lanjut

uk Ditanggapi

Unjuk Diketahui

1.

2.

3.

Positif

Segera

untuk perubahan dan lebih peduli terhadap keadaan serta tidak malas. Apalagi tidak mempunyai kemauan untuk berubah dan belajar. Misalnya untuk menertibkan harga-harga Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro bisa memberikan wewenang kepada UPT Malioboro. "Wewenang yang ada pada walikota bisa dilimpahkan pelaksanaannya di lapangan kepada UPT Malioboro untuk menertibkan, entah itu kebersihan ataupun tarif," ungkap Sultan HB X.

Raja Kraton Yogya ini menjelaskan, semua harus dididik dan mempunyai kesadaran diri baik warga lokal maupun pendatang melalui unit yang ditunjuk dan berwenang untuk menertibkan. Apabila ada pengunjung membuang sampah sembarangan di Malioboro, tegur dan disuruh mengambil sampah untuk dimasukkan ke tempat sampah. "Jika unit pelaksana teknis yang seharusnya bertugas dan bertanggungjawab untuk menertibkan di kawasan Malioboro tidak melakukan apapun, saya langsung akan ganti orangnya yang mempunyai kemampuan di lapangan untuk bertindak menertibkan," tandas Sultan HB X.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Gatot Septadi menyampaikan, problematika retribusi parkir yang mahal atau tidak masuk akal, tidak hanya terjadi di Kota Yogya, namun sudah berkembang di seluruh destinasi wisata di DIY. Hal ini sudah disampaikan dalam rapat koordinasi kunjungan wisatawan yang terkendala dengan maraknya retribusi parkir yang mahal. "Kita kembali pada regulasi yang telah ditetapkan sesuai perda retribusi parkir masing-masing kota/kabupaten yang ada, merekalah otoritas yang berwenang bertindak tegas menertibkan tarif maupun tempat parkirnya," kata Gatot.

Gatot mengaku telah banyak menerima keluhan perihal persoalan tarif parkir dan maraknya parkir liar tersebut di sejumlah daerah di DIY. Namun kewenangan tetap ada di kabupaten/kota yang mempunyai dasar penertiban tarif dan tempat parkir dengan

payung hukum perda masing-masing. "Siapa yang berbuat menyalahi aturan ya harus ditindak induknya yang mengeluarkan retribusi parkir tersebut. Pemkot/Pemkab harus konsisten dan konsekuen untuk itu," imbuh Gatot.

Penjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY ini menyatakan, kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota seharusnya sudah siap dan bisa menjabarkan sekaligus menjalankan tupoksinya. Apabila kabupaten/kota tidak sanggup menertibkan problematika pariwisata di wilayahnya, maka bisa diambil langkah kerja sama lintas sektoral. Semisal persoalan penataan dan pemeliharaan kawasan Malioboro bisa dibentuk tim terpadu untuk pemeliharaan.

"Kalau itu dibutuhkan dan unit yang sebenarnya sudah ada di Pemkot/Pemkab tidak jalan, kita bisa membentuk tim terpadu lintas instansi yang akan mencari formula dan bergerak bersama-sama. Intinya DIY itu nyaman dan aman bagi wisatawan terutama pelayanannya, saya harap persoalan ini jangan sampai berlarut-larut terjadi ataupun dibiarkan," tandas Gatot.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Aris Riyanta menuturkan, penanganan dan pengaturan perpajakan di kawasan pariwisata merupakan kewenangan Pemkot/Pemkot setempat. Bantuan mengatasi masalah tersebut dalam jangka menengah dan panjang sebaiknya dilakukan dengan perencanaan yang terukur dan memunculkan kolaborasi, baik Satuan Perangkat Kerja Daerah di Pemda dan swasta serta kelompok masyarakat yang akan diberdayakan, sehingga harmoni dan bersinergi dalam ikut berkontribusi membangun daerah.

"Jangka pendek mungkin tim Saber Pungli di kabupaten/kota bisa dioptimalkan. Hal ini sebagai upaya preventif agar tidak terjadi potensi pungli di kawasan wisata yang bisa memperburuk citra pariwisata DIY nantinya," kata Aris.

Dispar DIY, menurutnya, sudah sering

dan secara periodik melakukan bimbingan teknis kepada kelompok sadar wisata maupun pengelola destinasi agar menerapkan Sapta Pesona, tidak terkecuali bagi pelaku/pegiat wisata. Contohnya di kawasan Malioboro yang berada di bawah Pemkot Yogya sudah memiliki UPT Malioboro hingga Jogo Boro dan kelompok komunikasi lainnya yang sekiranya bisa menjadi model dalam pengaturan kawasan wisata tersebut, sehingga wisatawan betul-betul merasa aman dan nyaman serta tidak banyak komplain atau keluhan.

Lain halnya dengan Hamzah Hendro Sutikno. Pimpinan Hamzah Batik (dulu Mirota Batik) di kawasan Malioboro ini mengatakan, seharusnya kita bersyukur karena Yogya sebagai kota wisata masih banyak diminati wisatawan. "Berapa miliar rupiah uang dari luar daerah yang masuk ke DIY," kata Hamzah.

Tapi, lanjut Hamzah, karena pandapat yang belum merata, kemudian muncul kejadian yang bisa merusak citra Yogya sebagai kota pariwisata. "Kalau orang berpikir jauh ke depan, bukan hanya berpikir sesaat ingin cepat dapat uang, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, karena dampaknya itu meluas," katanya.

Tapi semua itu tidak bisa diawasi apabila tidak ada peraturan dari pemerintah. Jadi memang harus ada peraturan dari pemerintah yang detail dan kalau perlu ada sanksi atau denda bagi yang melanggar. "Tanpa adanya peraturan dari pemerintah, mengontrol masyarakat itu amat sulit," katanya.

Menurut Hamzah, bagaimanapun citra Yogya sebagai kota pariwisata harus dijaga betul. Jangan sampai mumpung liburan dan Yogya banyak dikunjungi wisatawan, kemudian orang hanya berpikir sesaat mendapat uang banyak tanpa memikirkan citra pariwisata Yogya -o



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005